

WEEKLY NAWALA EKUATORIAL



Sorotan Utama



Inovasi



Panduan Praktis

Catatan

Editor

Mengurai Benang Hijau Keuangan Indonesia

Selamat datang di Nawala Ekuatorial. Padakuartal ketiga 2025 ini, dunia korporasi Indonesia berada pada titik balik yang krusial. Keberlanjutan (*sustainability*) telah mengalami transformasi fundamental. Isu yang dulu kerap dipinggirkan sebagai bagian dari program CSR, kini telah merasuk ke jantung pengambilan keputusan strategis. Pergeseran ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang didorong tiga kekuatan besar: mandat regulasi yang semakin ketat, tuntutan investor global dan domestik yang makin cerdas, dan peluang pasar baru bernilai triliunan rupiah.

Lanskap bisnis kini ditata ulang dengan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG). Perusahaan yang gagal beradaptasi tidak hanya menghadapi risiko reputasi, tetapi juga risiko finansial nyata—dari kesulitan mengakses modal hingga kehilangan daya saing. Sebaliknya, mereka yang berhasil mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam DNA operasionalnya akan menemukan sumber baru untuk pertumbuhan, inovasi, dan ketahanan jangka panjang.

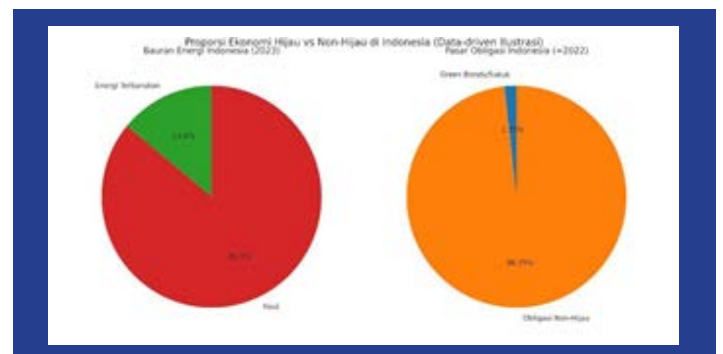
Edisi Nawala Ekuatorial kali ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi para pemimpin untuk menghadapi era baru ini. Kami akan membedah tiga pilar utama: pertama, mengurai kerangka regulasi yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Kedua, menampilkan inovasi terdepan dari pelopor sektor keuangan yang mengubah prinsip keberlanjutan menjadi produk dan layanan nyata. Ketiga, menyajikan panduan praktis untuk menyusun laporan keberlanjutan yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga strategis dan berdampak.

Selamat membaca.

Keuangan Hijau Indonesia: Macet di Aturan, Tertinggal di Aksi



Indonesia resmi memasukkan konsep keuangan berkelanjutan ke dalam kerangka aturan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan **POJK No.51/POJK.03/2017** tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada Juli 2017. Aturan itu menjadi landasan formal agar perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam bisnis dan penyaluran pembiayaan. Namun, delapan tahun berlalu sejak penerbitan POJK tersebut — kemajuan aliran pembiayaan hijau masih jauh dari harapan: *green bond* minim, kredit untuk energi bersih terbatas, dan pembiayaan fosil tetap dominan.



Sumber:

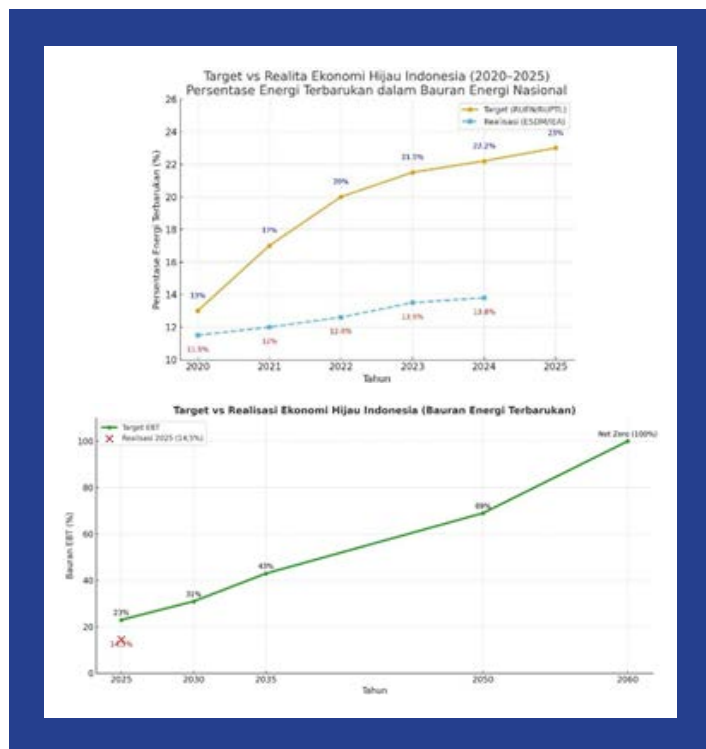
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Statistik Energi Baru Terbarukan 2023.
- Kementerian Keuangan RI & Climate Bonds Initiative (CBI) Country Briefs.

Kenyataan di Lapangan

Indonesia sendiri punya target ekonomi hijau yang bisa dibilang ambisius. Bappenas menargetkan Indonesia menjadi negara dengan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang tinggi pada tahun 2045, serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada 2030 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Indonesia belum mencapai semua target ekonomi hijau-nya, terutama dalam bauran energi terbarukan. Pemerintah menetapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nasional mencapai 23% dari total energi primer pada tahun 2025 lewat Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan PP KEN 79 Tahun 2014. Namun, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah untuk revisi KEN (RPP KEN), target tersebut dikoreksi menjadi 17-19% pada 2025 agar lebih realistis. Pemerintah sendiri menyebut bahwa target 23% pada 2025 sulit dicapai.

Per tahun 2024, capaian bauran EBT di Indonesia adalah 14,1% dari energi nasional. Dengan target resmi semula 23%, capaian 14,1% masih cukup jauh — kekurangannya sekitar 9-10 poin persentase. Jika menggunakan target revidusi (17-19%), pencapaian 14,1% masih belum memenuhi, tapi berada lebih dekat ke bagian bawah kisaran target tersebut. Meski demikian, perlu dicatat bahwa capaian sekitar 14-15% juga bukan tanpa kemajuan: dibanding 10 tahun lalu, ada peningkatan, kapasitas terpasang bertambah, dan regulasi dan komitmen semakin diarahkan ke transisi energi.



Beberapa hal yang dianggap membuat pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia lambat:

● Kesenjangan antara aturan dan insentif ekonomi nyata

POJK 2017 memberi kerangka kewajiban pelaporan dan integrasi ESG, tapi tidak cukup memberi insentif fiskal atau mekanisme pasar yang membuat proyek hijau jadi lebih kompetitif dibanding proyek konvensional. Tanpa subsidi, jaminan risiko, atau kebijakan harga karbon yang kuat, investor swasta menilai proyek hijau berisiko relatif tinggi.

● Pipeline proyek hijau yang tidak bankable

Banyak proyek berkelanjutan, khususnya yang terkait adaptasi dan ketahanan iklim di daerah belum disiapkan dengan struktur keuangan yang menarik bagi bank dan investor. Kurangnya studi kelayakan, arus kas yang tidak jelas, dan kapasitas pengembangan proyek membuat bank enggan menyalurkan kredit.

● Kapasitas kelembagaan yang terbatas

Banyak LJK (lembaga jasa keuangan) yang belum matang dalam melakukan penilaian risiko iklim, integrasi ESG ke model kredit, atau melaksanakan pelaporan yang kredibel. Pasar modal lokal juga kekurangan penjamin, penilai, dan verifikator hijau yang memadai. Hal ini menahan tumbuhnya instrumen seperti green bond dan green sukuk.

● Ambiguitas kebijakan dan sinyal regulasi yang bercampur

Indonesia mengembangkan taksonomi hijau (Indonesia Taxonomy for Sustainable Finance) dan memperbaruinya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, beberapa klasifikasi kontroversial (misalnya pelabelan kapasitas tertentu dalam rantai nilai nikel/energi sebagai "amber") memicu kritik dan kebingungan pasar soal apa yang benar-benar 'hijau'. Ketidakjelasan seperti ini melemahkan kepercayaan investor internasional yang sensitif terhadap greenwashing.

● Modal dan instrumen pembiayaan yang belum memadai

Akses ke instrumen pendanaan campuran, jaminan kredit hijau, atau fasilitas refinancing untuk green loans masih terbatas. Selain itu, dana pensiun dan asuransi (potensi besar untuk modal jangka panjang) belum cukup diarahkan ke aset hijau. Mobilisasi modal domestik untuk proyek hijau belum optimal.



Strategi dan rekomendasi

Berikut strategi praktis—dengan urutan prioritas—yang dapat dijalankan oleh pemerintah, OJK, sektor perbankan, pasar modal, serta mitra pembangunan:

Langkah segera

- **Perkuat sinyal regulasi dan harmonisasi taksonomi**

Perjelas kriteria taksonomi (selaras dengan target NDC/Paris) dan komunikasikan perubahan dengan transparan agar investor memahami batas antara “green”, “transition”, dan “non-eligible”. Kurangi ruang untuk interpretasi yang memicu tuduhan greenwashing.

- **Sediakan fasilitas jaminan/pengurang risiko untuk proyek awal (first-loss guarantees)**

Pemerintah/IFIs dapat menyiapkan fasilitas jaminan yang menutup risiko awal proyek hijau sehingga bank lokal berani memulai portofolio hijau dan membangun rekam jejak. Model ini terbukti mempercepat investasi awal di negara lain.

- **Standardisasi Laporan ESG dan integrasi cepat ke pengawasan OJK**

Jadwalkan pelaporan ESG yang lebih ringkas dan wajib untuk bank besar, disertai pedoman audit/verifikasi eksternal yang jelas. OJK bisa mengintegrasikan penilaian ESG ke dalam penilaian kesehatan bank (supervisory review).

Langkah jangka menengah

- **Skema insentif fiskal dan pembiayaan ulang hijau (green refinancing)**

Perkenalkan insentif pajak, suku bunga preferensial via fasilitas refinancing dari bank pemerintah, atau obligasi hijau pemerintah untuk memperdalam pasar domestik.

- **Bangun pipeline proyek bankable**

Fasilitasi program untuk pemerintah daerah dan pengembang proyek agar study kelayakan, struktur kontrak, dan model bisnis

memenuhi kriteria investor. Sediakan template kontrak, model konversi grant loan, dan mekanisme revenue-sharing.

- **Mobilisasi dana pensiun & asuransi**

Atur regulasi yang mendorong alokasi sebagian aset jangka panjang ke instrumen hijau, dengan guardrail risiko yang jelas dan insentif untuk investasi jangka panjang.

Langkah jangka panjang

- **Transparansi karbon & mekanisme harga**

Kembangkan kerangka harga karbon yang jelas (market or tax-based) atau dukung mekanisme sertifikat emisi yang dapat membuat proyek rendah karbon menjadi lebih menguntungkan.

- **Integrasi climate stress tests dan requirement transition plans**

Wajibkan institusi keuangan besar melakukan climate stress tests dan menyusun transition plans untuk portofolio mereka (phase-out roadmap untuk eksposur batu bara misalnya). Ini memberi jalur yang dapat diprediksi bagi pelaku pasar.

- **Perkuat ekosistem jasa pendukung pasar hijau**

Investasi dalam peningkatan kapasitas untuk underwriters, verifikator, dan lembaga pemeringkat lokal agar mereka mampu mendukung volume transaksi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada konsultan asing.

Dari aturan ke aksi: perlunya kombinasi kebijakan dan pasar

POJK 2017 memberi fondasi regulatori yang penting namun fondasi saja tidak cukup. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu mengisi celah antara aturan dan realitas pasar: insentif nyata, mengurangi risiko awal, serta membangun kepercayaan pasar. Dukungan terkoordinasi antara OJK, Kementerian Keuangan, bank pembangunan, serta mitra pembangunan internasional adalah kunci. Tanpa itu, POJK 2017 hanya akan jadi dokumen regulasi bukan motor transisi energi dan iklim. ■

Para Pelopor Keuangan Hijau Indonesia



Regulasi yang progresif di Indonesia telah meletakkan fondasi untuk keuangan hijau, tetapi transformasi sesungguhnya terjadi ketika para pelaku pasar mulai berinovasi di atas fondasi tersebut. Sektor jasa keuangan, terutama perbankan, tampil sebagai motor penggerak utama. Mereka tidak hanya menanggapi aturan, tetapi juga secara proaktif menangkap peluang bisnis yang besar dalam ekonomi hijau. Para pelopor ini berhasil menerjemahkan konsep keberlanjutan yang abstrak menjadi produk dan layanan keuangan yang nyata. Hasilnya: tercipta pasar baru dan aliran modal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

“
Pellentesque
habitant morbi
tristique senectus
netus et malesuada
egestas.”



Evolusi Produk Keuangan Hijau: Dari Niche ke Mainstream

Beberapa tahun lalu, produk keuangan berlabel “hijau” masih dianggap produk niche. Kini, lanskapnya berubah drastis Bank-bank besar di Indonesia menawarkan portofolio produk berkelanjutan yang canggih dan beragam, untuk nasabah korporat maupun ritel. Beberapa inovasi utama antara lain:

Produk Keuangan Hijau	Cara Kerja	Manfaat
Green Bonds(Obligasi Hijau)	Instrumen utang untuk membiayai proyek lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, atau transportasi ramah lingkungan.	Pendanaan tepat sasaran untuk proyek berdampak besar.
Green/Social Loans (Pinjaman Hijau/ Sosial)	Dana pinjaman digunakan eksklusif untuk proyek hijau atau sosial, dengan model “use-of-proceeds”	Mendukung inisiatif yang selaras dengan SDGs
Sustainability-Linked Loans (SLLs)	Pinjaman ini bisa digunakan untuk tujuan umum, tetapi suku bunga tergantung pencapaian target ESG.	Insetif nyata untuk perusahaan yang bertransisi hijau.
Corporate-in-Transition Financing	Dukungan finansial bagi perusahaan yang sedang menyesuaikan operasi mereka dengan target iklim nasional atau Perjanjian Paris.	Memungkinkan dekarbonisasi sektor besar.
Produk Ritel Berkelanjutan	Termasuk KPR hijau untuk properti bersertifikat ramah lingkungan dan pembiayaan kendaraan listrik	Aksi iklim yang terjangkau untuk masyarakat luas.



Inovasi Tiga Raksasa Perbankan Indonesia

Bank Mandiri: Arsitek Keuangan Transisi

- **Peran Utama:** Fasilitator utama transisi ekonomi Indonesia.
- **Strategi:** Tiga pilar (sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking).
- **Produk Unggulan:** Corporate-in-Transition Financing, Sustainability-Linked Loans, dan Reksa Dana ESG.
- **Fokus:** Membantu perusahaan besar dalam dekarbonisasi dan mendanai perubahan sistemik, bukan hanya membiayai proyek yang sudah hijau.

BCA: Juara Efisiensi Internal dan Pembiayaan Berkelanjutan

- Pendekatan: "Walking the talk," fokus pada portofolio pembiayaan hijau dan efisiensi operasional internal.
- Portofolio Unggulan: Kredit Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar Rp 69,6 triliun dan pembiayaan kendaraan listrik yang tumbuh 84% YoY.
- Inisiatif Internal: Gedung Green Mark Super Low Energy, pemasangan panel surya di 27 gedung, dan penurunan intensitas penggunaan energi.
- Posisi: Penyedia modal hijau sekaligus contoh praktik terbaik operasional.

BRI: Mesin Inklusi Sosial dan Penggerak Ekonomi Kerakyatan

- Fokus: Dimensi sosial dalam ESG, berperan sebagai tulang punggung pembiayaan UMKM.
- Kontribusi Sosial: Portofolio kredit UMKM mencapai Rp 698,66 triliun (57,46% dari total kredit) pada tahun 2024.
- Inisiatif Lingkungan: Menerbitkan Green Bond Rp 2,5 triliun dan memiliki portofolio pembiayaan sektor hijau Rp 86,56 triliun.
- Target: Mencapai Net Zero Emissions 2050 yang telah divalidasi oleh SBTi.
- Model: Mengintegrasikan dekarbonisasi lingkungan dan penguatan inklusi sosial secara seimbang.

Roda Gila Keberlanjutan: Keunggulan Kompetitif Bank Pionir

Analisis terhadap para pelopor ini mengungkapkan sebuah dinamika pasar yang menarik. Bank-bank yang bergerak lebih dulu dalam agenda keberlanjutan kini mulai menuai keuntungan kompetitif yang signifikan. Mereka membangun sebuah "roda gila keberlanjutan" (*sustainability flywheel*). Berikut siklus empat tahapannya:



Siklus yang saling menguatkan ini menciptakan sebuah "roda gila" yang terus berputar, memberikan keunggulan kompetitif yang sulit disaingi oleh bank-bank lain yang terlambat memulai perjalanan keberlanjutan mereka. ■

Menyusun Laporan Keberlanjutan yang Berdampak

Menyusun laporan keberlanjutan pertama kali bisa terasa menakutkan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, ini bukan sekadar kewajiban, melainkan latihan strategis yang sangat berharga. Laporan yang baik tidak hanya memenuhi regulasi (seperti POJK 51/2017), tetapi juga membangun kepercayaan dengan investor, menarik talenta terbaik, dan memperkuat reputasi merek.

Mengapa Laporan Keberlanjutan Penting?

Laporan ini adalah lebih dari sekadar dokumen. Ini adalah alat strategis yang memberikan nilai nyata:

- **Membangun Kepercayaan:** Transparansi kepada investor, pelanggan, dan masyarakat.
- **Manajemen Risiko:** Mengidentifikasi dan mengelola risiko ESG (Environmental, Social, Governance) sejak dini.
- **Meningkatkan Reputasi:** Membedakan Anda dari kompetitor dan menunjukkan komitmen nyata.
- **Attract Talent:** Generasi baru pekerja lebih loyal kepada perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
- **Kinerja Finansial:** Perusahaan dengan ESG kuat sering dikaitkan dengan kinerja keuangan yang lebih baik.

“
Pellentesque
habitant morbi
tristique senectus
netus et malesuada
egestas.”

Langkah-Langkah Praktis Menyusun Laporan



Langkah 1: Pilih Kerangka Kerja yang Diakui

Meski POJK 51/2017 adalah dasar, gunakan kerangka internasional untuk kredibilitas dan keterbandingan yang lebih tinggi.

Rekomendasi Utama: GRI (Global Reporting Initiative).

Digunakan oleh ±81% perusahaan global. Terdiri dari:

- Universal Standards: Berlaku untuk semua organisasi.
- Sector Standards: Spesifik industri (e.g., pertanian, energi).
- Topic Standards: Topik spesifik (e.g., emisi, hak asasi manusia).

Langkah 2: Lakukan Penilaian Materialitas

Ini adalah fondasi strategis laporan Anda. Penilaian Materialitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan topik-topik ESG yang paling penting bagi dampak bisnis Anda dan paling relevan bagi pemangku kepentingan.

Bagaimana Melakukannya? Melalui Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement)

Siapa yang Dilibatkan? investor, Karyawan, Pelanggan, Pemasok, Pemerintah, Komunitas Lokal.

Metode:

- Survei & Kuesioner
- Wawancara Mendalam
- FGD (Focus Group Discussion)
- Forum Online/Webinar

Hasil: Sebuah "Peta Materialitas" yang memprioritaskan isu-isu dari yang paling penting hingga kurang penting, sehingga laporan Anda fokus dan impactful.

Langkah 3: Kumpulkan Data yang Berkualitas

Setelah topik prioritas diketahui, kumpulkan data untuk mendukungnya. Ini adalah bagian yang paling teknis. Bangun Sistem Tata Kelola Data yang jelas untuk memastikan data:

- Akurat: Benar dan terukur.
- Konsisten: Metode yang sama dari tahun ke tahun.
- Dapat Diaudit: Siap untuk diverifikasi oleh pihak ketiga.
- Kualitas data adalah tulang punggung kredibilitas laporan.

Prinsip-Prinsip Pelaporan yang Kredibel

Agar laporan dipercaya dan berguna, terapkan prinsip-prinsip inti dari GRI:

Prinsip	Pertanyaan kunci untuk diuji
Akurasi	Apakah informasinya benar dan detail? Apakah metode pengukurannya dijelaskan?
Keseimbangan	Apakah dampak positif dan negatif dilaporkan secara jujur dan adil?
Kejelasan	Apakah bahasanya mudah dipahami dan bebas dari jargon berlebihan?
Keterbandingan	Apakah data disajikan konsisten setiap tahun untuk lacak tren?
Kelengkapan	Apakah semua topik material dan informasi penting telah dicakup?
Ketepatan Waktu	Apakah laporan diterbitkan secara rutin dan tepat waktu?

Mindset: Dari Kepatuhan Menuju Strategi

Jangan pandang laporan ini sebagai sekadar beban kepatuhan. Lihatlah sebagai alat strategis yang powerful.

Alur Logika Strategis:

Proses Pelaporan -> Mengidentifikasi Risiko & Peluang ESG -> Mengelolanya secara Proaktif -> Menghasilkan Organisasi yang Lebih Tangguh dan Berkinerja Lebih Baik.

Laporan yang dipublikasikan hanyalah puncak gunung es. Nilai sebenarnya terletak pada proses introspeksi, manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan yang terjadi di dalam organisasi Anda.

Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda—bukan untuk mematuhi aturan, tetapi untuk membangun masa depan bisnis yang lebih kuat dan bermakna. ■

Weekly



Nawala Ekuatorial Premium terbit setiap Rabu dengan sajian utama membedah regulasi, menyajikan inovasi, serta merekomendasikan aksi. Nawala ini diterbitkan oleh **Ekuatorial.com** untuk para peminat dan praktisi Keberlanjutan di Indonesia.

Nawala Ekuatorial

Jalan Pengadengan Utara I No. 1A
Pancoran, Jakarta Selatan